

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Program PUAP

a. Pengertian Program Usaha Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang semakin kompleks maka pemerintah berusaha untuk mengatasinya melalui pelbagai program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang masuk dalam PNPM Mandiri Agribisnis/ SADI (*Smallholder Agribusiness Development Initiative*). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan Program dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan sektor. Program PUAP ini diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pemberian beberapa pelatihan terhadap masyarakat petani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program PUAP diatur dalam Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 16/ Permentan / OT.140/ 2 /2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Penyaluran dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) disesuaikan dengan kebutuhan petani untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah dengan melalui tahap-tahap tertentu sesuai dengan prosedur yang telah ada atau direkomendasikan oleh Departemen Pertanian. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada pelaku agribisnis di pedesaan melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). GAPOKTAN merupakan kelembagaan tani pengelola PUAP untuk penyaluran modal usaha bagi anggota. GAPOKTAN sangaatlah berperan dalam keberhasilan pelaksanaan program PUAP ini karena sebagailembaga perekonomian petani yang mengatur pelaksanaan PUAP agarprogram PUAP itu sendiri bisa dirasakan manfaatnya oleh petani anggota. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan gabungan darikelompok tani, kelompok tani merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur, sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dannorma-norma tertentu yang khas.

b. Tujuan Usaha Pengembangan Agribisnis Pedesaan

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- 2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani.

- 3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- 4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Pedoman Umum PUAP, 2011).

c. Sasaran Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Sasaran Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkembangnya usaha agribisnis didesa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.
- 2) Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi.
- 3) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani / peternak (pemilik dan / atau penggarap) skala kecil, buruh tani.
- 4) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman (Pedoman Umum PUAP, 2011).

d. Indikator Keberhasilan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

- 1) Indikator Keberhasilan output antara lain:
 - a) Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.
 - b) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

2) Indikator keberhasilan outcome antara lain:

- a) Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.
- b) Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
- c) Meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.
- d) Meningkatnya pendapatan petani (pemilik atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusahatani sesuai dengan potensi daerah.

3) Indikator benefit dan Impact antara lain:

- a) Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP.
- b) Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c) Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di Perdesaan (Pedoman Umum PUAP, 2011).

2. Gabungan Kelompok Tani

Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya. GAPOKTAN merupakan Wadah Kerjasama Antar Kelompok tani-nelayan (WKAK), yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani-nelayan yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan

komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Dalam Keputusan Menteri tersebut, dibedakan antara GAPOKTAN dengan Asosiasi Petani-Nelayan. Dalam batasan ini, asosiasi adalah kumpulan petani-nelayan yang sudah mengusahakan satu atau kombinasi beberapa komoditas pertanian secara komersial (Syahyuti, 2007). Peranan GAPOKTAN atau Gabungan Kelompok Tani dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengikat yang menyatukan dan menyalurkan kepentingan sosial dan ekonomi dalam bidang usahatani
- 2) Wadah untuk belajar berorganisasi kearah usaha bersama untuk kegiatan bisnis bersifat komersial
- 3) Pelancar tercapainya peningkatan produksi dan keuntungan petani
- 4) Wadah masyarakat dalam pemecahan masalah secara bersama-sama
- 5) Tempat mengembangkan sikap demokratis dan kepemimpinan

Fungsi GAPOKTAN yaitu merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. Selain itu, merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Sedangkan tujuan dari GAPOKTAN adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya petani pelaku agribisnis dalam rangka mewujudkan profesionalisme pelaku agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui optimalisasi penggunaan potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia (Departemen Pertanian, 2006).

3. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, berarti bahwa masalah kebijakan dibuat jelas (Dunn, 1999).

Menurut Kuncoro (2000), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti penilaian hasil. Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2004) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang dibakukan.

Suharsimi Arikunto (2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.

Sedangkan Stufflebeam (1993) menjelaskan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan public dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negative. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat.

b. Jenis-jenis Evaluasi Program

Menurut Nugroho (2009) secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.

Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

2) Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan

Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

c. Tujuan Evaluasi Program

Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk:

- 1) Memberikan masukan bagi perencanaan program.

- 2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.
- 3) Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.
- 4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program.
- 5) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program.
- 6) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Selanjutnya Sudjana (2006) berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut:

- 1) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- 2) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- 3) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- 4) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu,

kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.

- 5) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

d. Proses Evaluasi

Sirait (1990) menjelaskan bahwa dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi antara lain:

- 1) Semua tugas/tanggung jawab pemberi tugas/yang menerima tugas harus jelas.
- 2) Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi yaitu mencari kesalahan harus dihindari.
- 3) Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif/kualitatif jumlahitas program secara tehnik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
- 4) Tim yang melakukan evaluasi adalah pembari saran/nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta pembuat keputusan atas dasar saran/nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
- 5) Dalam proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data/penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena

menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitannya dengan program.

- 6) Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

4. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Procces, Product)

Ada berbagai model evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi suatu program diantaranya ada evaluasi model Krickpatrick, model Wheel (Roda) dari Beebe, model Provus (*Disperancy model*), model Stake (*Countenance model*), model Brinkerhoff, dan model CIPP (*context, input, procces, product*) oleh Stufflebeam. Mengevaluasi program berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mana keputusan diambil untuk menindak lanjuti program yang sudah berjalan seperti yang diungkapkan Menurut Sudjana (2008), “model evaluasi program yang terpusat untuk pengambilan keputusan adalah model evaluasi CIPP, alasan pengambilan model ini karena kedekatannya dengan evaluasi program PUAP yang sistematis mencakup komponen, proses, dan tujuan program.”

Kusuma (2016), mengemukakan pendapat yang sama bahwa “evaluasi dengan model CIPP ini, pada prinsipnya mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pemilihan alternatif dan penindak lanjutan konsekuensi dari suatu keputusan.” Selanjutnya Sukardi (2011), menentukan jenis evaluasi pada lembaga diklat dengan variabel terukurnya: (1) pencapaian (2)

kemampuan dan (3) personal. Sedangkan jenis keputusannya: (1) perspektif intruksional dan (2) alokasi sumber daya.

Dari pendapat ahli dan mengacu pada beberapa model evaluasi diatas maka yang dirasa paling tepat untuk mengevaluasi program pelatihan di PUAP adalah dengan menggunakan model evaluasi CIPP oleh Stufflebeam. Berikut akan dijelaskan mengenai tahapan evaluasi menggunakan model CIPP.

Menurut Kusuma (2016), “Model CIPP merupakan hasil kerja para tim peneliti, yang tergabung dalam suatu organisasi komite Phi Delta Kappa USA, yang ketika itu diketuai oleh Daniel Stuffle-Beam.” Selanjutnya menurut Widyoko (2013), “Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.” Menurut Arikunto (2007), “model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah system.” Menurut Tayibnaxis (2008), Stufflebeam & Shinkfield adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternative keputusan”.

Menurut Stufflebeam (1993), untuk mewakili 4 keputusan terdapat empat jenis evaluasi yang masing-masing diperuntukkan bagi setiap tipe keputusan, yaitu:

- a. *Context evaluation as a means of servicing planning decisions*
- b. *Input evaluation these structuring decision*

c. *Procces evaluation to guide implementing*

d. *Product evaluation to serve recycling decisions*

Berdasarkan 4 tipe keputusan di atas Kusuma (2016), menjelaskan garis besar empat macam keputusan yaitu:

(1) perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus, (2) keputusan pembentukan atau *structuring*, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan, (3) keputusan implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana-prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana metode, dan strategi yang hendak dipilih, dan (4) keputusan pemutaran (*recycling*) yang menentukan, jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau dihentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Adapun aspek-aspek dari setiap model CIPP (*Context, Input, Process*, dan *Produk*), maka masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan seperti berikut:

a. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

“*Context evaluation to serve planning decision*. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program” (Tayibnapis, 2008). Selanjutnya menurut Kusuma (2016), fokus evaluasi konteks, “menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan.” Lebih jelasnya Sudjana (2008) menjelaskan:

Evaluasi konteks program menyajikan data tentang alasan alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas tujuan. Evaluasi ini menjelaskan mengenai kondisi lingkungan yang relevan, menggambarkan kondisi yang ada dan yang digunakan dalam lingkungan, dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang belum dimanfaatkan. Evaluasi ini pun menggambarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program seperti karakteristik dan perilaku peserta, kurikulum, keunggulan dan kelemahan tenaga pelaksana, sarana dan prasaran, pendanaan, dan komunitas.

Selanjutnya menurut Stufflebleam (1993) “*The primary orientation of a context evaluation is to identify the strengths and weaknesses of some object, such as an institution, a program, a target population, or a person, and to provide direction for improvement.*” Hal ini dapat diartikan orientasi utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari beberapa objek, seperti institusi, program, populasi target, atau seseorang, dan untuk memberikan arahan untuk perbaikan. Lebih lanjut Stufflebleam (1993) menjelaskan jika, “*evaluasi konteks* merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program (latar belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi yang akan dikembangkan atau dicapai dalam system program), legalitas program, dukungan lingkungan, karakteristik populasi dan sasaran serta tujuan program.”

Maka dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dari evaluasi konteks adalah mengevaluasi perencanaan program dan tujuan dari suatu program sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang belum dimanfaatkan dan menganalisis dukungan apa saja yang didapat dalam pelaksanaan program.

b. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

“*Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur untuk mencapainya” (Tayibnapi, 2008). Fokus evaluasi input menurut Kusuma (2016), “menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan

kelemahan strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan.” Selanjutnya Sudjana (2008), menjelaskan:

Evaluasi masukan (input) program menyediakan data yang menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pembiayaan, efektivitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul. Evaluasi ini mencakup kegiatan identifikasi dan penilaian (1) kemampuan system yang digunakan dalam program, (2) strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan program, dan (3) rancangan implementasi strategi yang dipilih. Untuk mengimplementasikan program perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat yang diharapkan.

Stufflebeam (1993) mengemukakan “*The main orientation of an input evaluation is to help prescribe a program by which to bring about needed changes.*” Diartikan orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu meresepkan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan tentang kebutuhan. Sedangkan menurut Stufflebeam (1993) sebagai berikut:

evaluasi *Input* menyediakan informasi tentang aspek sarana-prasarana yang mendukung tercapainya tujuan program yang ditetapkan. Komponen input mencakup indicator: SDM (sasaran program, pendamping dan pengelola program), materi pelatihan, jenis kegiatan, sarana dan prasaran pendukung, dana/anggaran, prosedur atau aturan yang diperlukan.

Maka dari beberapa pendapat di atas maka ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi masukan (*input*) adalah mengevaluasi sumber-sumber yang ada, dan strategi untuk mencapai tujuan program.

c. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

“*Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki” (Tayibnaps, 2008). Focus evaluasi proses menurut Kusuma (2016), “menyediakan informasi untuk para

evaluatoer melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan.” Selanjutnya Sudjana (2008), menjelaskan:

Evaluasi proses menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efesiensi pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengaruh system dan keterlaksanaannya. Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan program dan pelaksanaannya. Menyediakan data untuk keputusan dalam implementasi program. Model evaluasi ini berkaitan dengan hubungan akrab antar pelaksana dan peserta didik, media komunikasi, logistic, sumber-sumber, jadwal kegiatan, dan potensi penyebab kegagalan program.”

Selanjutnya Stufflebeam (1993) mengemukakan “*the process evaluator could review the program plan and any prior evaluation on which it is based to identify on which it is based to identify important aspects of the program that should be monitored.*” Yang maknanya pada tahap evaluasi proses seorang evaluatoer bisa meninjau rencana program dan setiap evaluasi sebelumnya yang didasarkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari program yang harus di pantau. lebih lanjut Stufflebeam (1993) menjelaskan jika,

“Evaluasi *process* menyediakan informasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dan strategi yang dipilih di lapangan, sejauhmana rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan apakah mempertimbangkan karakteristik sasaran program. Komponen proses mencakup indikator: persiapan, proses pemberdayaan, bimbingan usaha, kemitrausahaan, pengendalian pelaksanaan program, hambatan/dukungan yang dijumpai selama pelaksanaan program.”

Maka dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi proses adalah mengevaluasi pelaksanaan dan prosedur program yang sedang dilaksanakan untuk mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan.

d. Evaluasi Produk/ Hasil (*Product Evaluation*)

“*Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?” (Tayibnapi, 2008). Focus evaluasi produk menurut Kusuma (2016), “mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan, jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, modifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk yang seperti sekarang.” Selanjutnya Sudjana (2008), menjelaskan

Evaluasi produk mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. evaluasi produk melibatkan upaya penetapan kriteria, melakukan pengukuran, membandingkan ukuran keberhasilan dengan standar absolute atau relative, dan melakukan interpretasi rasioanl tentang hasil dan pengaruh data tentang konteks, input, dan proses.

Stufflebeam (1993) menjelaskan tujuan evaluasi produk “*The purpose of a product evaluation is to measure, interpret, and judge the attainments of a program.*” Yang artinya tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian dari program. Lebih lanjut Stufflebleam (1993),

Evaluasi *product* menghasilkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan untk menentukan apakah strategi, prosedur atau metode yang telah diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut harus dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan dalam bentuknya yang sekarang. Komponen produk mencakup indikator: pencapaian tujuan, dampak program terhadap sasaran didik, orangtua/masyarakat dan penyelenggara.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi produk merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian kriteria evaluasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat

menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Selanjutnya dari penelitian Hanafi (2016), menyimpulkan masing-masing setiap komponen model CIPP adalah sebagai berikut:

(1) **Evaluasi konteks** adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. (2) **Evaluasi masukan** membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. (3) **Evaluasi proses** adalah kegiatan yang dilakukan dalam program yang diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Pada tahap evaluasi proses seorang evaluator bisa meninjau rencana program dan setiap evaluasi sebelum yang didasarkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari program yang harus dipantau. (4) **Evaluasi produk** atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi setelah dijalankannya program. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian dari program.”

e. Efektivitas Program

Menurut Kaswan (2013), “program pelatihan terbukti efektif jika pelatihan tersebut mampu meningkatkan kinerja, memperbaiki semangat kerja, dan mendongkrak potensi organisasi.” Selanjutnya menurut Arikunto (2004), efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas adalah sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau dapat juga tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan.

Batas efektivitas ini ditetapkan dengan keberhasilan yang mendekati dengan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan menurut Noe (2010), “pada umumnya suatu program pelatihan dikatakan efektif jika hasil dari pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan peserta. Manfaat bagi peserta pelatihan dapat

mencakup pembelajaran, keahlian dan perilaku baru.” R Elkin dan Cornick dalam Herawati (2011), mengemukakan kriteria mengukur efektifitas program yaitu:

- 1) Produktivitas dari tujuan khusus program yang diekspresikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- 2) Pencapaian hasil dampak dari pelayanan kepada individu yang tercermin dari fungsi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3) Dampak program terhadap komunitas.

Maka dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan yang disebut dengan efektivitas program adalah apabila suatu program berhasil mendekati bahkan mencapai kriteria evaluasi yang telah ditentukan dan memberikan manfaat terhadap individu serta komunitas social disekitar program yang diimplementasikan sehingga tujuan dari program dapat tercapai.

B. Penelitian Terdahulu

Yonete Maya Tupamahu, (2013) dengan judul Efektifitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Pada Gapoktan Bunga Nilam di Desa Simau Kec. Galela Kab. Halmahera Utara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan Program PUAP pada Gapoktan Bunga Nilam di Desa Simau efektif atau tidak. Indikator penelitian ini adalah pelaksanaan tugas: (1) Pengurus Gapoktan; (2) Penyuluh Pendamping; (3) Penyelia Mitra Tani. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan sistem pemberian skor. Penentuan skor menggunakan skala Likert, skor terbesar adalah tiga (3) untuk jawaban selalu, dua (2) untuk jawaban sering, dan satu (1) untuk jawaban tidak pernah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada Gapoktan Bunga Nilam di Desa Simau tidak

efektif. Hal ini disebabkan pelaksana program PUAP di tingkat kecamatan dan desa yang menjalankan tugasnya hanya Pengurus Gapoktan, sedangkan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani tidaklah melaksanakan tugasnya. Disarankan perlu dilakukan evaluasi mengenai kompetensi petugas pelaksana PUAP sehingga pelaksana di lapangan harus diganti. Serta perlu dilakukan pendampingan secara kontinu oleh petugas pendamping Gapoktan, sehingga efektifitas pelaksanaan program PUAP dapat tercapai.

Sri Ayu Kurniati, (2016) dengan judul Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Pedesaan (PUAP) di Kab. Indragiri Hulu. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi karakteristik petani, 2) Mengetahui pelaksanaan program PUAP, 3) Menganalisis kinerja gapoktan, dan 4) Menganalisis dampak kegiatan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani. Penelitian menggunakan metode survei. Hasil penelitian memperlihatkan petani penerima dana BLM PUAP dalam kategori tenaga kerja produktif, rata-rata berpendidikan rendah, sangat paham dengan segala aktivitas dalam usahatani, jumlah anggota keluarga rata-rata 4 jiwa, dominan usaha perkebunan kelapa sawit dengan rata-rata luas lahan sempit, dan status kepemilikan lahan adalah milik sendiri. Struktur kepengurusan organisasi gapoktan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara,

Masruroh, Aini (2016) dengan judul Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Makmur Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai lembaga pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang (2) mengetahui pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. Purposive method digunakan untuk

menentukan daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kinerja Gapoktan Karang Makmur sebagai pengelola program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang berada pada kategori baik; (2) Pengelolaan program PUAP di Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang berlangsung baik, namun untuk mencapai keberhasilan outcome program PUAP sebagaimana disebutkan dalam pedoman umum PUAP masih belum dapat direalisasikan secara keseluruhan.

Johannes Kapri Pandiangan (2011) dengan judul” Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan, peran Penyuluh, peran GAPOKTAN, serta untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode CIPP (context, input, process, product) serta dengan metode diskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) desa Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dapat dikategorikan baik. 2. Penyuluh Pertanian Lapangan sangat berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan para petani pada umumnya dan para pengurus GAPOKTAN khususnya dan juga dalam pengawasan program PUAP. 3. GAPOKTAN memiliki peran sentral dalam program PUAP. Terutama dalam proses penyusunan RUB (Rencana Usaha Bersama) hingga proses pencairan dan pengembalian dana PUAP. 4. Pelaksanaan program PUAP di desa Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang telah dapat

dikategorikan berhasil. Nilai tingkat keberhasilan program PUAP di daerah penelitian adalah 42.79 dengan persentase ketercapai sebesar 89.16%.

Agus Dwi Nugroho (2018) dengan judul Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Penelitian ini bermaksud 1) untuk mengetahui implementasi PUAP; 2) mengetahui efektivitas PUAP bagi perubahan pendapatan masyarakat dan faktor yang memengaruhinya; 3) mengetahui kinerja dan efisiensi LKM-A serta faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUAP mampu meningkatkan pendapatan petani; mengurangi jumlah penduduk miskin; meningkatkan jumlah anggota, simpanan, dan aset gapoktan; meningkatkan lapangan kerja dan mendorong petani untuk tidak meminjam dana ke lembaga lain. Akan tetapi, PUAP juga mengalami masalah, diantaranya penyimpangan penyaluran dana PUAP, penggunaan dana PUAP tidak sesuai rencana, kredit macet, sebagian besar LKM-A belum berbadan hukum serta kapasitas SDM pengelola masih rendah. Faktor penentu efektivitas program PUAP yaitu lama pinjaman dan jenis usaha. Sebagian besar LKM-A di DIY berkinerja kurang baik. Faktor penentu efisiensi LKM-A adalah jumlah modal mandiri dan adanya pendampingan. Langkah untuk perbaikan PUAP antara lain pengawasan dan pendampingan LKM-A; pengendalian kredit macet; pemilihan jenis usaha LKM-A, dan pendorongan LKMA untuk menjadi lembaga yang berbadan hukum.

Jessie F. Tilung (2014) dengan judul Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe. Program PUAP yang diberikan oleh pemerintah di Desa Warukapas khususnya Gapoktan Esa Toroan telah berjalan dengan baik dengan melihat 1. Keluaran (Output), dana

bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa tersalurkan dengan baik kepada anggota kelompok tani, tepat pada sasaran bagi yang membutuhkan. 2. Hasil (Outcome), petani responden yang menerima PUAP bisa lebih terbantu dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan maupun keterampilan lainnya yang diberikan oleh setiap penyuluh pendamping yang ada. Pendapatan petani penerima PUAP naik secara signifikan yang sebelumnya rata-rata Rp.15.446.403, setelah menerima PUAP naik dengan rata-rata sebesar Rp. 20.927.239. 3. Manfaat (Benefit), program PUAP ini bukan hanya menguntungkan bagi petani responden yang mendapat bantuan dana, tetapi juga kepada masyarakat lain yang terlibat dengan kegiatan usahatani yang dikelola oleh petani responden, artinya petani yang mempekerjakan masyarakat lain untuk membantu usahatannya secara tidak langsung sudah membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, dengan begitu peningkatan usahatani lewat bantuan dari program ini juga bisa mempekerjakan lebih banyak pengangguran. 4. Dampak (Impact), selain bagi petani penerima PUAP peningkatan pendapatan juga terjadi pada masyarakat yang bekerja pada petani responden yang naik sebesar 21%. Penurunan tingkat kemiskinan di Desa Warukapas dapat menunjukkan bahwa program PUAP juga turut berperan dalam masalah kemiskinan. Angka kemiskinan khususnya yang ada di Desa Warukapas menurun dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2012, begitu juga pada umumnya di Kabupaten Minahasa Utara angka kemiskinan menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2012.

C. Kerangka Pemikiran

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program PNPM – Mandiri melalui bantuan

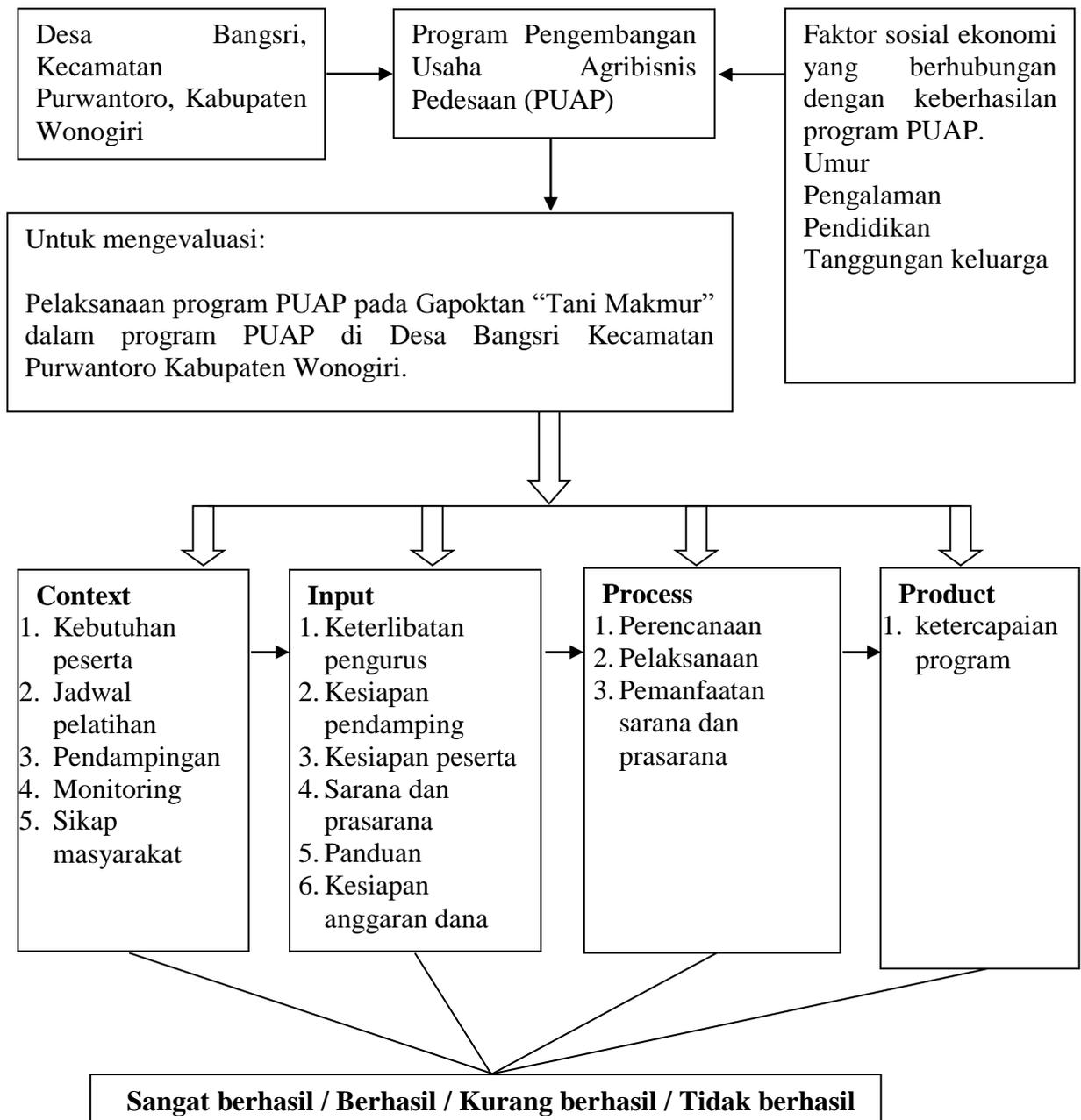
modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran serta ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dimulai sejak tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada gapoktan-gapoktan dengan nilai Rp 1,0573 triliun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP.

Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri dipilih oleh peneliti karena merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sejak tahun 2015 yang dikelola oleh LKM, dan diusulkan dari para kelompok tani melalui GAPOKTAN “Tani Makmur”. Bantuan PUAP berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha sebesar 100.000.000,00 (seratus juta) untuk setiap desa yang menjadi sasaran PUAP untuk petani atau peternak, pemilik dan atau petani penggarap skala kecil, buruh tani maupun rumah tangga tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP.

Permasalahan yang muncul dari program PUAP yaitu pelaksanaan program PUAP di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri dinyatakan belum berhasil. Adanya hambatan pada program PUAP seperti adanya penunggakan dana atau pengembalian dana pinjaman PUAP kepada pengurus Gapoktan. Penunggakan dana PUAP berdampak pada kemacetan untuk pencairan

dana terhadap petani lain yang belum sempat mendapatkan dana PUAP. Produktivitas hasil tanaman padi menurun, dan penggunaan PUAP yang tidak tepat sasaran. Rendahnya kualitas SDM sehingga pelaksanaan program kesulitan untuk mengajak kerjasama. Tingginya biaya modal bahan baku, peralatan tradisional, keterbatasan lahan dan tenaga kerja, kurangnya penunjang dalam perawatan masa tanam hingga masa panen, faktor cuaca yang tidak menentu, dan harga pasaran yang tidak menentu membuat petani merugi.

Pentingnya evaluasi program PUAP karena pelaksanaan program PUAP di Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri belum menunjukkan adanya suatu tanda-tanda dari keberhasilan. Evaluasi berguna untuk memberikan penilaian khususnya kepada para stake holder (pemangku kepenatan) dan atau pemerintah selaku pembuat kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berlandaskan pada kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mendeskripsikan evaluasi program PUAP, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, input, process, product*) dari Stufflebeam sebagai model evaluasi program PUAP sehingga setiap komponen yang terkait akan dievaluasi berdasarkan tiap aspek CIPP. Adapun skema dalam penelitian ini disajikan berikut.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Menggunakan Model CIPP